

# Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Sistem Pengendalian Intern, dan Dukungan Organisasional terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)

Suci Nastiti Salsabila<sup>a</sup>, Nashirotn Nisa Nurharjanti<sup>b</sup>,

<sup>ab</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

<sup>a</sup>sucinastitisalsabila@gmail.com

<sup>b</sup>nnn122@ums.ac.id

## Abstract

This study aims to determine the effect of Human Resource Competence, Supporting Devices, Internal Control Systems and Organizational Support on the Successful Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards. The approach used in this research is a quantitative approach. This research was conducted on 20 Regional Apparatus Organizations (OPD) of Klaten Regency. The number of samples taken was 85 employees. This research uses purposive sampling. Data collected by the questionnaire method. Data analysis using Multiple Regression Analysis which includes descriptive statistics, classical assumption test, and hypothesis testing (multiple linear regression, simultaneous test, and partial test). Based on the test results in this study, it can be said that the competence of human resources and internal control systems affect the successful application of accrual-based government accounting standards. Meanwhile, supporting tools and organizational support have no effect on the success of implementing accrual-based government accounting standards

**Keywords** : Human Resources Competence; Supporting Devices; Implementation of Internal Control Systems; Successful Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Sistem Pengendalian Intern dan Dukungan Organisasional terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten. Jumlah sampel yang diambil 85 pegawai. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan dengan metode kuisioner. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda yang mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis ( regresi linear berganda, uji simultan, dan uji parsial). Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI. Sementara itu perangkat pendukung dan dukungan organisasional tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI.

**Kata Kunci** : Kompetensi Sumber Daya Manusia; Perangkat Pendukung; Penerapan Sistem Pengendalian Intern; Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

## 1. Pendahuluan

Penerapan SAP dapat mempermudah entitas-entitas dan Badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam menyusun laporan akuntansi yang mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya akan dijadikan faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Erna, 2020).

Fenomena mengenai laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berterima umum. Seperti dalam opini dari BPK yang dilihat dari website BPK Jawa Tengah menyatakan :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama tujuh tahun terakhir yaitu tahun 2012-2018 mendapat opini WTP sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2014, 2015, dan 2018

2. Pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Klaten tahun 2016 dan 2017 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2017 menyebutkan salah satu penyebab kegagalan itu lantaran tidak sesuai dengan penyajian laporan saldo Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai tak valid sehingga Pemkab Klaten kembali meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Ketidakkonsisten isian penilaian pada Pemkab Klaten atas opini BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi pertanyaan besar apakah yang terjadi dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten, hal itu menggambarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten masih banyak terdapat kesalahan serta belum adanya peningkatan terhadap pengelolaan dan peningkatan terhadap pengelolaan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode berikutnya agar laporan keuangannya di tahun yang akan datang bisa mendapat opini audit WTP. Jadi, banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dan disclameir (tidak menyatakan pendapat), karena dalam penyajiannya belum sesuai dengan standar yang diterapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang ditemukan (Kadek Desiana *et al.*, 2014).

Pemerintah yang transparan dan akuntabel dibuktikan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada beberapa pemerintah daerah pada tahun 2018 oleh KPK dengan mengungkapkan korupsi yang dilakukan oleh 28 kepala daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sedianingsih *et al.*, (2020) yang menyatakan Kebanyakan pemerintah daerah tidak bisa menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik sehingga mudah dilakukan manipulasi laporan keuangan pemerintah daerah. Manipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan dalam bentuk Lapping Seperti dimana utang proyek tahun ini dibayar dengan APBD tahun berikutnya, yang sebenarnya dalam pengelolaan keuangan daerah ada aturan bahwa tidak boleh melakukan kegiatan jika tidak ada anggarannya.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jantong (2018), (Tyas *et al.*, 2017), (Andika

Yulianto, 2018) dan (Sedianingsih *et al.*, 2020) dengan menambah dua variabel yaitu sistem pengendalian intern dan dukungan Organisasional. Penggabungan ini dimaksudkan untuk dapat memahami tentang kesiapan pemerintah daerah terhadap penerapan SAP akrual dan dapat memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan fenomena penerapan SAP akrual yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

## 2. Kajian Literatur.

### 2.1 *New Public Management (NPM)*

New Public Management dikenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Kemudian, Hood menyingkat istilah ini menjadi NPM. NPM merupakan pendekatan manajemen modern di sektor publik. NPM telah mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif hampir di seluruh dunia. Manajemen sektor publik mengalami perubahan yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan tetap terarah.

### 2.2 *Teori Institusional*

Teori institusional ini merupakan salah satu model kebijakan publik yang digunakan dalam model tradisional. Teori NPM lahir untuk melengkapi kelemahan dari teori institusional yang masih menggunakan model kebijakan publik tradisional. Oleh karena itu, teori institusional dan teori NPM adalah teori yang saling mengisi untuk menerapkan kebijakan publik yang lebih baik. Teori institusional merupakan teori yang relevan dengan penerapan SAP berbasis akrual.

## 3. Pengembangan Hipotesis

### 3.1 *Kompentensi Sumber Daya Manusia*

Teori NPM menginginkan organisasi sektor publik dikelola secara profesional agar manajer publik memiliki kebebasan dan keleluasan untuk mengelola keuangan secara akuntabel pada organisasi yang dipimpinnya. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten sehingga memiliki kesiapan dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Pernyataan ini sejalan dengan Jantong (2018) yang menyatakan bahwa kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintahan daerah sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama operasi sebuah organisasi, termasuk jika ada perubahan dalam organisasi. Suatu organisasi akan berhasil dalam melaksanakan setiap aktivitasnya jika didukung dengan sumber

daya yang memiliki komitmen dan kompetensi, dan sebaliknya.

**H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kesiapan Penerepan SAP Berbasis Akrual**

### 3.2 Perangkat Pendukung

Teori institusional yang salah satunya menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas (Nia permatasari, 2018). Artinya dalam memasuki era modernisasi organisasi memiliki tekanan untuk dapat mengadopsi perangkat pendukung yang sudah dilakukan organisasi lain yaitu berupa media dalam penyusunan laporan keuangan yang menggunakan komputer dalam melakukan pekerjaannya. Penelitian tentang pengaruh perangkat pendukung pernah diteliti oleh Tyas *et al.* (2017) hasil penelitiannya Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bandung, artinya semakin tinggi atau memadainya Perangkat Pendukung yang ada pada bagian keuangan OPD Kota Bandung, maka Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bandung pun akan semakin baik.

**H2 :Perangkat Pendukung Berpengaruh Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual.**

### 3.3 Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Perspektif teori institusional dalam penelitian ini berusaha menekankan pada isomorfisme koersif yaitu tekanan eksternal yang berhubungan dengan lingkungan disekitar organisasi dimana pemerintah sebagai suatu institusi yang memenuhi syarat mutlak, yaitu memiliki tatanan sosial atau pola untuk mencapai ketetapan tertentu, aturan formal, prosedur, kepatuhan, dan standar prosedur operasional. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatmawati & Setiawan (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal memang penting untuk keputusan internal. Pengendalian internal penting untuk mendukung kebermanfaatan keputusan informasi, karena dengan adanya pengendalian internal akan menjamin keakuratan, ketepatan dan keandalan informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan dan menerapkan pengendalian secara baik dan benar dalam pelaporan keuangan daerah, maka tujuan pelaporan keuangan akan lebih mudah dicapai dan meminimalkan risiko.

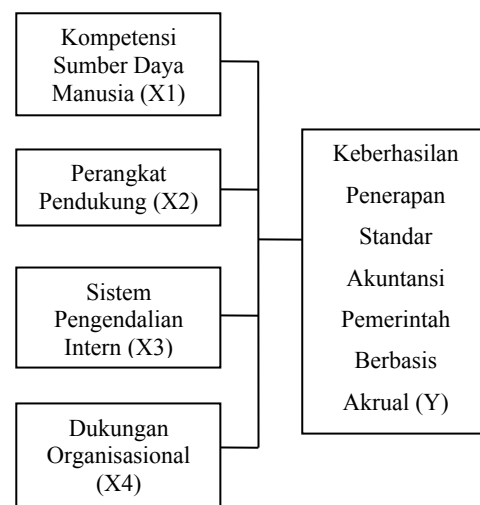
**H3 : Penerapan sitem pengendalian intern berpengaruh terhadap implementasi**

**standar akuntansi pemerintah berbasis akrual**

### 3.4 Dukungan Organisasional

Teori institusional mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan publik. Artinya dalam menyusun laporan keuangan seorang karyawan juga membutuhkan dukungan dari seorang atasan dalam perusahaan atau instansi. Penelitian (Sylvian Veronica, *et al.*, (2015) menyatakan Dukungan organisasional dalam mengimplementasikan sistem baru sangat dibutuhkan oleh pengguna sistem informasi. Dukungan tersebut dapat beberapa pemberian fasilitas dan pemberian pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal sebagai bentuk komitmen organisasi yang mendukung proses perubahan dan mempermudah pelaksana untuk memahami dan mempelajari sistem baru. Apabila dukungan organisasi untuk berubah dirasakan oleh individu tinggi maka meningkatkan manfaat yang dipersepsikan oleh pengguna terutama waktu dan usaha yang diperlukan untuk mempelajari cara kerja sistem informasi akuntansi yang baru

**H4 : Dukungan Organisasional berpengaruh terhadap terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual**



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 Organisasi Perangkat Pendukung (OPD) di pemerintahan kabupaten klaten dan Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di bidang kepala bagian, bendahara dan staf bagian keuangan/ akuntansi di masing-masing unit OPD sehingga sampel yang digunakan berjumlah 85 responden.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menggunakan kriteria tertentu.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai di masing-masing unit OPD Kabupaten Klaten. Dalam kuisisioner untuk setiap jawaban dari pertanyaan telah ditemukan skornya dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugioyono, 2013:32). Pada umumnya skala likert menggunakan lima angka penelitian yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan

setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

### 3.3 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (*Software Statistics Product for the Social Science*). Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan analisis regresi berganda.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian merupakan ringkasan dari informasi yang diperoleh dari data dan disajikan dari bentuk uji t dan uji f

**Tabel 1.** Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	23,825	7,228		3,296	,001
	Sumber Daya Manusia(Total)	-,404	,135	-,304	-2,989	,004
	Perangkat Pendukung(Total)	,168	,162	,105	1,036	,304
	Sistem Pengendalian Intern(Total)	,413	,129	,329	3,195	,002
	Dukungan Organisasional(Total)	,155	,135	,120	1,146	,255

a. Dependent Variable: Standar Akuntansi Pemerintahan(Total)

Ada pun bentuk persamaan dari hasil perhitungan diatas adalah :

$$Y = 23,825 - 0,404SDM + 0,168PP + 0,413SPI + 0,155DO + e$$

1. Nilai *constant* sebesar 23,825 yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), perangkat pendukung (X2), penerapan sistem pengendalian intern (X3), dan dukungan organisasional (X4) diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan mengalami kenaikan sebesar 23,825.

2. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM1) sebesar -0,404 dan bernilai negatif. Artinya apabila variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan nilai Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual (SAPBA) sebesar -0,404.

3. Nilai koefisien regresi variabel Perangkat Pendukung (PP2) bernilai 0,168. Artinya apabila variabel perangkat pendukung mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (SAPBA) sebesar 0,168.

4. Nilai koefisien regresi variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI3) bernilai

0,413. Artinya apabila variabel sistem pengendalian intern mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (SAPBA) sebesar 0,413.

5. Nilai koefisien regresi variabel Dukungan Organisasional (DO4) bernilai 0,155. Artinya apabila variabel dukungan organisasional mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (SAPBA) sebesar 0,155.

#### 4.1 Hasil uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen secara parsial. Pengaruh diantara mereka dapat ditentukan oleh signifikansi statistik 0,05.

### Pembahasan

#### Hipotesis 1

Dapat dilihat bahwa untuk variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan nilai sig (0,004) < 0,05 dengan nilai t (-2,989) > 1,990:  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, Artinya terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Kabupaten Klaten. Teori NPM menginginkan organisasi sektor publik dikelola secara profesional agar manajer publik memiliki kebebasan dan keleluasan untuk mengelola keuangan secara akuntabel pada organisasi yang dipimpinya. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten sehingga memiliki kesiapan dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrua.

Penelitian (Permana & Wiratmaja, 2016) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrua, maka dari itu semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah OPD maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua

#### Hipotesis 2

Dapat dilihat bahwa untuk variabel perangkat pendukung menunjukkan nilai sig (0,304) > 0,05 dengan nilai t (1,036) < 1,990 dengan :  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima, Artinya tidak terdapat pengaruh Perangkat Pendukung terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Kabupaten Klaten. Teori institusional

menunjukkan dalam memasuki era modernisasi organisasi memiliki tekanan untuk dapat mengadopsi perangkat pendukung yang sudah dilakukan organisasi lain yaitu berupa media dalam penyusunan laporan keuangan yang menggunakan komputer dalam melakukan pekerjaannya

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Langelo *et al.*, 2015) hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perangkat pendukung tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dalam penyajian laporan keuangan karena pemerintah kota bitung belum menerapkan PP No.71 tahun 2010 dan kesiapan perangkat pendukung (tools) dalam hal ini SIMDA yang belum teruji untuk Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua karena masih dikembangkan,

#### Hipotesis 3

Dapat dilihat bahwa untuk variabel sistem pengendalian intern menunjukkan nilai sig (0,002) < 0,05 dengan nilai t (3,195) > 1,990 :  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, Artinya terdapat pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Kabupaten Klaten. Perspektif teori institusional menekankan pada isomorfisme koersif yaitu tekanan eksternal yang berhubungan dengan lingkungan disekitar organisasi dimana pemerintah sebagai suatu institusi yang memenuhi syarat mutlak, yaitu memiliki tatanan sosial atau pola untuk mencapai ketetapan tertentu, aturan formal, prosedur, kepatuhan, dan standar prosedur operasional.

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terkoordinasi dengan baik diikuti keinginan dan konsistensi seluruh anggota dalam mengikuti aturan-aturan yang diterapkan SPI maka implementasi pelaporan keuangan berbasis akrua akan semakin baik khususnya dalam sistematika laporan yang dibuat karena salah satu tujuan utama dari penerapan SPI adalah reabilitas pelaporan keuangan sehingga laporan yang dibuat dapat berkualitas sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Luh desy *et al.*, (2017) dalam penelitiannya menunjukkan berdasarkan hasil uji pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05 artinya terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

#### Hipotesis 4

Dapat dilihat bahwa untuk variabel dukungan organisasional menunjukkan nilai sig (0,255) > 0,05 dengan nilai t (1,416) < 1,990 :  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima, Artinya tidak terdapat pengaruh Dukungan Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Kabupaten Klaten. Teori institusional mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan publik. Artinya dalam menyusun laporan keuangan seorang karyawan juga membutuhkan dukungan dari seorang atasan dalam perusahaan atau instansi.

Dukungan organisasional memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus

pengembangan sistem implementasi. Disamping itu penelitian (Kusuma, 2013) menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini, yang mengatakan dukungan organisasional satuan kerja di wilayah KPPN Semarang I masih sangat terbatas. Apabila dukungan organisasional dapat dirasakan oleh pegawai maka meningkatkan manfaat yang dipersiapkan oleh pengguna terutama waktu dan usaha yang diperlukan untuk mempelajari cara kerja sistem informasi akuntansi yang baru. Suatu organisasi yang mengadopsi suatu sistem harus diperhatikan faktor dukungan, pelatihan, karena akan berpengaruh nantinya terhadap pemahaman sistem akuntansi baru yang akan dijalani.

**Tabel 2. Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	388,673	4	97,168	5,794	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1341,632	80	16,770		
	Total	1730,306	84			

a. Dependent Variable: Standar Akuntansi Pemerintahan(Total)

b. Predictors: (Constant), Dukungan Organisasional(Total), Perangkat Pendukung(Total), Sumber Daya Manusia(Total), Sistem Pengendalian Intern(Total)

#### 4.2 Hasil uji f

Berdasarkan hasil regresi berganda diperoleh nilai hitung sebesar 5,794 dengan nilai signifikansi 0,000 (0%). Ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM1), Perangkat Pendukung (PP2), Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI3) dan Dukungan Organisasional (DO4) berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (SAP) di Kabupaten Klaten. Dengan kata lain, variabel independen yang digunakan dalam penelitian berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

#### 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung, penerapan sistem pengendalian intern dan dukungan organisasional terhadap keberhasilan penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrua di organisasi pemerintah

daerah Kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua di Kabupaten Klaten,
2. Tidak berpengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua di Kabupaten Klaten
3. Terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua di Kabupaten Klaten,
4. Tidak berpengaruh dukungan organisasional terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua di Kabupaten Klaten,

#### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan kuisisioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga penulis tidak dapat mengawasi secara langsung atau pengisian jawaban tersebut, dikarenakan saat pengisian tidak dapat ditunggu secara langsung sehingga jawaban dari responden mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi tertentu masing-masing responden.
2. Objek penelitian ini hanya fokus pada OPD Dinas dan Badan Kabupaten Klaten, sehingga hasil penelitian hanya berlaku pada daerah yang bersangkutan saja.
3. Penelitian ini terbatas pada variabel yang telah digunakan peneliti terdahulu, sehingga belum menentukan ada faktor lain yang mempengaruhi Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas subjek penelitian, sehingga hasil penelitian lebih bisa mewakili secara keseluruhan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

#### Daftar Pustaka

- Arih, T. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah kota bandung. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(1), 67-78.
- Erna, E. Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(5), 527-537.
- Fatmawati, R., & Setiawan, D. (2018). Dampak Pengendalian Intern dan Ketepatan Informasi Terhadap Kebermanfaatan Akuntansi Akrual: Studi pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 137-150.
- Jantong, A., Nurkholis, N., & Roekhudin, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Kusuma, M. I. Y., & Fuad, F. (2013). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada*

- pemerintah* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Permana, I. B. G. B., & Wiratmaja, I. D. N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2260-2287.
- Sedianingsih, S., Safitri, Y. E., & Sinulingga, R. A. (2020). Pengaruh Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, Dan Pelatihan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 5(1), 745-761.
- Suhendro, S. A. R. I. N. G., Sylvia Veronica, N., & Nauli, P. (2015). Resistensi Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Yulianto, A. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).